

## Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Dprd Provinsi Bali Pasca Pemotongan Anggaran Tahun 2025

Ni Ketut Arniti<sup>1</sup>, Angelistha Pranatha Das<sup>2</sup>, I.G.A.A. Dewi Sucitawati Pinathi<sup>3</sup>, Ni Putu Bayu Widhi Antari<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia  
E-mail: ketutaltarniti@undiknas.ac.id<sup>1</sup>, angelisthapranatha@gmail.com<sup>2</sup>  
iga\_dewi@undiknas.ac.id<sup>3</sup>, bayuwidhiantari@undiknas.ac.id<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 15 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 30 Januari 2026

**Keywords:** Efisiensi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, Pemotongan Anggaran, Sekretariat DPRD

**Abstract:** Penelitian dengan evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali pasca pemotongan anggaran tahun 2025 terkait dengan pemotongan anggaran nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan penyesuaian fiskal di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, dengan pengurangan anggaran sebesar 53% dalam satu tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pasca pemotongan anggaran, serta melihat bagaimana kinerja pegawai dipertahankan di tengah keterbatasan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan anggaran berdampak pada kegiatan operasional seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK, dan penyediaan konsumsi rapat. Meskipun demikian, Sekretariat DPRD masih mampu menjaga fungsi administrasi dan dukungan kedewanan melalui penyesuaian prioritas kerja dan pengendalian belanja. Efektivitas organisasi tetap tercapai melalui optimalisasi proses dan pembatasan kegiatan non-esensial, sementara efisiensi dicapai melalui pengurangan biaya operasional. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan berada pada kategori cukup efisien dan efektif, namun tetap memerlukan strategi adaptif untuk menjaga stabilitas kinerja lembaga.

### PENDAHULUAN

Evaluasi adalah proses ilmiah yang berfokus pada penilaian kritis terhadap suatu objek, seperti program, kebijakan, atau kinerja. Proses ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi data yang kredibel dan objektif menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi berfungsi sebagai dasar rasional untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Evaluasi kebijakan pada sektor publik adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu kebijakan publik, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Analisis evaluasi menempati posisi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang

diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Febrianingsih & Handayani, 2025) Mengatakan evaluasi merupakan upaya untuk memberikan penilaian. Biasanya evaluasi identik dengan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. evaluasi ini digunakan untuk menjadi bahan kajian suatu kebijakan agar dapat mengatasi faktor – faktor kegagalan dari kebijakan itu sendiri. Maka dari itu evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pemerintahan.

Pemeriksaan kebijakan dalam sektor public merupakan proses esensial yang secara intristik terhubung dengan kinerja sektor tersebut. Hubungan ini dapat dipahami melalui beberapa dimensi fundamental. Pertama, evaluasi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah, memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (A. Z. Rahman & Saputra, 2022) menyatakan evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan besaran anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap program kegiatan di setiap kecamatan dengan realisasi penggunaan yang telah dicapai pada tahun anggaran yang bersangkutan. maka dari itu Melalui evaluasi, kinerja sektor publik tidak hanya dinilai dari output semata, melainkan juga dari outcome dan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Maka dari ini manajemen sektor publik sangat berdampak dalam pengelolaan kebijakan, apakah kebijakan ini mampu dan berhasil untuk diatasi.

Kinerja sektor seringkali menjadi indikator utama keberhasilan suatu entitas dalam menjalankan mandatnya. Kinerja ini tidak hanya merujuk pada capaian fisik program, melainkan juga mencakup kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. (A. Z. Rahman & Saputra, 2022) Dengan demikian, sinkronisasi antara peningkatan kinerja sektor dan penerapan efisiensi anggaran menjadi krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Efektivitas, dalam konteks ini, mengacu pada tingkat pencapaian sasaran dan dampak yang diinginkan dari suatu intervensi (Koromath, 2020) Menyatakan efektivitas berarti penggunaan anggaran harus dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, dengan menjalankan program secara maksimal. Oleh karena itu, pasca pemotongan anggaran fokus utama adalah *strategi adaptif* yang memungkinkan, Sekretariat DPRD Provinsi Bali merupakan unsur pendukung utama bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Peran divisi keuangan dalam Sekretariat DPRD memiliki keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan keseluruhan kinerja lembaga. Divisi ini bukanlah sekadar unit administratif yang mengelola kas keluar masuk, melainkan merupakan penyokong utama operasional seluruh kegiatan. Setiap program, mulai dari rapat, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa, sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang tepat. Dalam kondisi pemotongan anggaran, peran ini menjadi semakin krusial. Namun, peran krusial ini menghadapi tantangan yang semakin besar dengan adanya fenomena pemotongan anggaran tahun 2025.

Dalam implementasi kebijakan ini, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dihadapkan pada tantangan berupa pengurangan anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar 53%. Kondisi tersebut menuntut lembaga untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional dan administratif. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pasca pemotongan anggaran ini untuk menilai sejauh mana Sekretariat DPRD Provinsi Bali mampu menyesuaikan strategi serta pengelolaan keuangannya agar tetap mendukung pencapaian tujuan kelembagaan secara optimal. Berdasarkan dampak pemotongan anggaran diatas, dalam penelitian yang sedang di buat oleh peneliti.

Dari berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh (Harefa dkk., 2022) yang menyoroti sejauh mana anggaran desa dikelola secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi

---

masyarakat; selanjutnya penelitian oleh (Makaminang et al., 2022) yang menilai kinerja anggaran melalui rasio efektivitas dan efisiensi; serta penelitian (Lasupu et al., 2021) penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja tergolong efektif dan efisien meskipun mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun.

Namun, ketiga penelitian tersebut masih berfokus pada kondisi anggaran yang stabil dan belum membahas situasi pemotongan anggaran besar secara nasional seperti yang terjadi akibat kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun secara nasional, termasuk di tingkat pemerintah daerah, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan publik—terutama pada lembaga strategis seperti Sekretariat DPRD yang berperan penting dalam mendukung fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan daerah.

Kesenjangan penelitian muncul karena belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana lembaga pemerintah daerah beradaptasi dan mempertahankan efektivitas serta efisiensi kinerja setelah mengalami pemotongan anggaran yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui rasio keuangan, sementara konteks saat ini memerlukan pendekatan evaluatif yang lebih *komprehensif* untuk menilai *strategi adaptif, inovasi manajerial*, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menjaga kualitas kinerja organisasi.

Oleh karena itu, penelitian Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Pasca Pemotongan Anggaran Tahun 2025 menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur administrasi publik terkait evaluasi kebijakan dan pengelolaan keuangan dalam situasi krisis fiskal, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik dan fungsi kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan empiris dalam studi pengelolaan keuangan publik pasca pemotongan anggaran, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi instansi pemerintah dalam merancang kebijakan efisiensi yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1 Evaluasi**

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai apakah kegiatan atau program yang sudah di jalankan berhasil atau tidak berhasil, evaluasi kebijakan adalah proses sistematis dan objektif untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan. Tujuannya bukan hanya untuk menentukan apakah suatu kebijakan berhasil, tetapi juga untuk memahami mengapa kebijakan itu berhasil atau gagal. Menurut (Warman et al., 2023) evaluasi adalah tahapan penting dengan metode sains yang teratur untuk melakukan proses memeriksa, menggambarkan dan menilai dengan melibatkan sebab – sebab keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan pada kegiatan yang berjalan atau telah berakhir hingga memperoleh dan menyediakan informasi yang objektif yang valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan. Maka dari itu kebijakan lebih berkenan pada kinerja atau program suatu kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan. Indikator Evaluasi berdasarkan (Warman et al., 2023) membagi ke tiga elemen utama yaitu :

1. Substansi atau Isi kebijakan (*Content/Design*),
2. Implementasi Kebijakan (*Implementation/Executio*)
3. Dampak Kebijakan (*Impact/Outcome*).

Evaluasi program juga diarahkan pada perolehan rekomendasi sehingga tujuan evaluasi

---

program tidak boleh terlepas dari tujuan program yang akan dievaluasi. Keduanya saling terkait karena tujuan program itu merupakan dasar untuk merumuskan tujuan evaluasi program. Secara singkat dapat dibuat sebuah ketentuan bahwa tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan titik tolak tujuan program yang dievaluasi. Dengan demikian tujuan evaluasi antara lain adalah;

- a. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan Dilihat dari aspek tertentu.

## **2 Efektivitas**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang di lakukan dengan baik. Menurut (Saputra & Widiyarta, n.d.) efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dengan sadar digunakan untuk menciptakan sebuah barang atau jasa dengan kualitas tertentu yang sesuai pada waktunya, adapun indikatornya dari efektivitas yaitu:

1. pencapaian tujuan
2. kesesuaian Proses
3. ketepatan waktu
4. pemanfaat sumber daya
5. terakhir Kualitas Hasil.

- a. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain: Efektivitas Proses, mengacu pada bagaimana proses pembelajaran di laksanakan, termasuk metode pengajaran, interaksi antara pengajar dan siswa, serta penggunaan sumber daya.
- b. Efektivitas hasil, menilai hasil akhir dari pembelajaran, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa setelah program.
- c. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain :
  - a) Survei dan Kusioner, mengumpulkan data dari siswa, pengajar, dan orangtua mendapatkan prespektif tentang efektivitas program.
  - b) Observasi, melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran untuk menilai interaksi dan metode yang digunakan.
  - c) Analisis hasil belajar, menggunakan data hasil ujian dan penilaian untuk mengukur pencapaian siswa.
  - d) Studi kasus, menganalisis kasus-kasus tertentu mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.

### **3. Efisiensi Kebijakan anggaran**

Efisiensi Kebijakan anggaran, sebuah konsep krusial yang melampaui sekadar penghematan biaya. Efisiensi anggaran bukan hanya tentang memangkas pengeluaran, melainkan tentang memaksimalkan nilai dan dampak positif dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh

pemerintah. Menurut (Yuliati, 2025) menyatakan efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Adapun indikator yaitu :

1. Rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang dianggarkan
2. perbandingan output terhadap input
3. Efisiensi Operasional,
4. Efisiensi waktu pelaksanaan
5. kualitas layanan vs biaya yang dikeluarkan.

Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang berpotensi mengubah cara pemerintahan negara dalam mengelola anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkrit untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Dengan demikian, efisiensi anggaran adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan berfokus pada dua pilar utama: efisiensi alokatif dan efisiensi teknis. Pertama, efisiensi alokatif menuntut adanya peninjauan ulang terhadap prioritas belanja untuk memastikan bahwa dana dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki dampak sosial terbesar, bukan sekadar program yang sudah berjalan.

Kedua, efisiensi teknis akan berfokus pada perbaikan proses internal untuk memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan dengan biaya operasional seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini mencakup penerapan sistem pengadaan yang transparan, eliminasi birokrasi yang tidak perlu, dan optimalisasi sumber daya manusia. Untuk mengukur keberhasilan, kami akan menggunakan metrik yang jelas dan terukur, seperti analisis biaya-manafaat dan indikator kinerja utama (KPI). Melalui evaluasi berkala dan berbasis data, kita dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengalihkan sumber daya dari program yang kurang produktif ke program yang terbukti efektif. Implementasi efisiensi anggaran yang komprehensif ini tidak hanya akan memperkuat fiskal negara dengan mengurangi defisit dan utang, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.

#### **4. Kinerja**

Kinerja secara umum adalah ukuran atau gambaran tentang seberapa baik seseorang, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Rinah et al., 2024) menyatakan kinerja (*performance*) adalah kemampuan untuk pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Adapun indikator kinerja yang dikelompokkan menjadi lima jenis utama:

1. masukan (*input*)
2. Keluaran (*Output*)
3. Hasil (*outcome*)
4. Manfaat (*benefit*) dan terakhir Dampak (*Impact*).

Kinerja mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil tersebut. Selain itu, kinerja juga dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu penyelesaian, secara kemampuan dalam mengatasi tantangan dan masalah yang muncul selama proses kerja (Huseno, Dr. Tun, SE., 2016).

Kinerja Sekretariat DPRD Bali (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pada dasarnya merupakan cerminan dari seberapa baik mereka mendukung dan memfasilitasi tugas-tugas utama

---

DPRD. Kinerja ini dapat diukur dari tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD yang optimal ditandai dengan kemampuan mereka dalam memberikan dukungan administratif dan teknis yang prima, seperti kelancaran rapat, pengelolaan dokumen yang rapi, dan pelayanan yang cepat untuk anggota dewan. Singkatnya, keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD adalah ketika seluruh proses kerja legislatif, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan efisien dan efektif, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka dari itu, penilaian kinerja penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja di masa depan. Dengan demikian, kinerja menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai bidang, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dinamakan sebagai metode baru. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih berkenaan dengan intrepresiasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, (Prof. Dr. Sugiyono, 2023 hal 8). Adapun sumber daya yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis di lapangan dengan mengadakan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka yang dilakukan terhadap dokumen resmi, buku, data statistic, arsip, dokumentasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun jenis berbentuk angka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling Dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di harapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Nahdlatul & Sulawesi, 2024). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala keuangan secretariat DPRD Provinsi Bali, pejabat fungsional, pengelola anggaran kepegawaian, dan pegawai perjalanan dinas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, menunjukkan hasil dan pembahasan sebagai berikut :

#### **1. Pemotongan Anggaran menurut Teori Evaluasi**

Berdasarkan teori evaluasi menurut Berdasarkan Teori Evaluasi menurut (Warman et al., 2023) evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga elemen utama, yaitu isi kebijakan, *Implementasi* Kebijakan, dan Dampak kebijakan. Ketiga elemen ini secara nyata terlihat pada perilaku Pak Edy sebagai (kepala bagian keuangan), berdasarkan wawancara bersama kunci informan pak Edy (kepala Bagian keuangan) pak Edy menyatakan mereka melakukan evaluasi besar - besaran tetapi tidak mengganggu kinerja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap hasil positif . pertama, dari isi kebijakan, keputusan pemotongan anggaran memiliki fokus untuk memastikan belanja wajib dan prioritas tetap terpenuhi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Panggalo et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan Efektivitas pelaksanaan program. (Panggalo et al., 2025) penelitian ini mengevaluasi implementasi dan realisasi anggaran pada Sekretariat daerah Kabupaten Yahukimo sedangkan penelitian ini akan lebih mendalam membahas pada strategi penyesuaian (*adjustments*) yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam pengelolaan keuangan setelah anggaran dipotong. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sepenuhnya sejalan dengan teori Evaluasi (Warman et al., 2023). Penjelasan kepala keuangan menunjukkan bahwa kebijakan

.....

pemotongan anggaran telah memenuhi ketiga indikator evaluasi (Warman et al., 2023) dengan kebijakan yang jelas substansinya, langkah implementasi yang terarah, serta dampak yang dapat diamati baik pada efisiensi anggaran pola kerja pegawai.

## 2. Pemotongan Anggaran Menurut Teori Efektivitas

Menurut (Saputra & Widiyarta, n.d.) Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dari tiga interaksi utama yaitu: pencapaian tujuan, kesesuaian Proses, ketepatan waktu, pemanfaat sumber daya dan terakhir Kualitas Hasil. Kelima faktor ini berperan penting dalam menentukan seberapa efektif pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Dalam konteks kinerja kepegawaian di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, kelima aspek ini tanpa jelas pada perilaku para pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Para pegawai juga memahami bahwa kinerja yang baik berpengaruh langsung terhadap kualitas kerja mereka maka dari itu mereka bekerja semaksimal mungkin dengan anggaran yang terbatas. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan teori Efektivitas menurut (Saputra & Widiyarta, n.d.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas berperang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan pada instansi. Kemampuan para pegawai dalam mencapai kinerja mereka dan juga pemanfaatan sumber daya yang terbatas tetapi menghasilkan kerja dengan kualitas hasil yang efisien.

## 3. Pemotongan Anggaran Menurut Teori Efisiensi Kebijakan Anggaran

Menurut (Rinah et al., 2024) menyatakan efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran maka dari itu Sekretariat DPRD Provinsi membatasi beberapa program namun tidak menghalangi program utama. Berdasarkan indikator menurut (Rinah et al., 2024) terlihat selaras dengan informan yang disampaikan para pegawai maupun kepala keuangan sekretariat DPRD Provinsi Bali. Para pegawai menjelaskan bahwa pemotongan anggaran membuat mereka harus menata ulang prioritas kerja, terutama dalam kegiatan yang bersifat operasional seperti perjalanan dinas, pelatihan, dan kebutuhan administratif. Temuan penelitian ini diperkuat oleh (Lasupu et al., 2021) yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai melalui pengendalian belanja dan penetapan skala prioritas saat organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya.

## 4. Pemotongan Anggaran Menurut Teori kinerja

Berdasarkan Teori Kinerja (Rinah et al., 2024) menyatakan kinerja (*performance*) adalah kemampuan untuk pencapaian sebuah tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kinerja yang baik tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana pegawai mampu menjaga ketertiban alur kerja, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan tetap memenuhi tanggung jawabnya secara profesional. Gambaran ini selaras dengan hasil wawancara para pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, yang mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran membuat mereka harus menata ulang cara kerja, menyederhanakan proses, dan lebih selektif dalam menjalankan kegiatan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmad Saleh & Andriana, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi belanja yang dikelola secara berbasis kinerja dapat mendorong pegawai untuk tetap bekerja optimal meskipun anggaran dibatasi, karena fokus kerja diarahkan pada aktivitas yang benar-benar mendukung tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan kondisi pegawai di Sekretariat DPRD Bali yang tetap menjaga kualitas pekerjaan meski sejumlah kegiatan harus dikurangi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sepenuhnya sejalan dengan teori Kinerja (Rinah et al., 2024) yang menjelaskan bahwa kinerja tercermin dari kemampuan pegawai dalam mencapai tugas organisasi

---

melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pegawai di sekretariat DPRD Provinsi Bali tetap mampu menata ulang proses kerja, menjaga produktivitas, dan mempertahankan kualitas layanan meski dengan anggaran terbatas.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali Pasca pemotongan anggaran terkait dengan Efisiensi dan Efektivitas adalah sebagai berikut : Pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebanyak 53% terhadap anggaran daerah, memberikan dampak langsung pada beberapa aktivitas operasional Sekretariat DPRD Provinsi Bali, terutama pada perjalanan dinas, penyediaan ATK, dan konsumsi rapat. Kegiatan yang sebelumnya dilakukan dua kali dalam sebulan harus dikurangi menjadi satu kali, dan kebutuhan rutin lainnya disesuaikan dengan format yang lebih sederhana. Meskipun terjadi pengurangan fasilitas dan penyesuaian alokasi belanja, divisi keuangan mampu mengatur ulang prioritas sehingga kegiatan utama yang bersifat strategis tetap dapat berjalan. Upaya penghematan ini dilakukan tanpa mengganggu fungsi inti kedewanan, karena Sekretariat tetap menjaga dukungan terhadap proses legislasi, persidangan, dan pengawasan. Pegawai juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan menyesuaikan ritme kerja, tetap menjaga ketepatan waktu, serta memastikan pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota dewan tetap berlangsung efektif.

Secara umum, kondisi keterbatasan anggaran tidak menurunkan kinerja pegawai maupun efektivitas Lembaga. Koordinasi antara bagian, kemampuan manajerial divisi keuangan, dan penetapan program prioritas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas operasional di Tengah tekanan fiskal. Dampak pemotongan anggaran lebih terlihat pada penyederhanaan aktivitas pendukung, bukan pada kualitas pelayanan inti. Dengan strategi pengelolaan keuangan yang selektif, akuntabel, dan adaptif terhadap kebijakan pemerintah pusat, Sekretariat DPRD Provinsi Bali berhasil mempertahankan efisiensi sekaligus menjaga kualitas fungsinya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali efisien, efektif, dan mampu mempertahankan kinerja organisasi meskipun mengalami tekanan fiskal signifikan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Arsi, A. 2021. "Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss". *Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss*, 1–8.
- Febrianingsih, G., dan Handayani, R. 2025. "EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS Di KABUAPTEN TANGERANG". *PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*9(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v9i1.1207>.
- Koromath, J. P. 2020. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari". *Lensa Ekonomi*, 11(01), 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., dkk. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una". *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433–1441.
- Nafisatur, M. 2024. "Metode Pengumpulan Data Penelitian". *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Panggalo, Y., Hoegh, K., dkk. 2025. "Evaluasi Implementasi dan Realisasi Anggaran Belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo", 1(2), 352–359.
- Peldi, Syahrudin, dkk. 2024. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Representasi Gaya Hidup Mahasiswa". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 78–83. diambil dari <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Rahman, A. Z., dan Saputra, F. L. 2022. "Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan

- daerah Kabupaten Cilacap". *Humanika*, 22(2), 117–126.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>.
- Saleh, R., dan Andriana, N. 2021. "Efektivitas dan Efisiensi Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja pada KPP Pratama Bulukumba". *Jurnal Info Artha*, 130–139.
- Saputra, D. P., dan Widiyarta, A. 2021. "Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo". *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194–211. <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>.
- Spradley, P., dan Huberman, M. 2024. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif". *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Usman, R. 2025. "Evaluasi Efisiensi Anggaran Belanja Modal dalam Pembangunan Infrastruktur", 1(17), 22–29.
- Warman, W., Komariyah, L., dkk. 2023. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>.
- Wijaya, I., Erna Kustyarini, dkk. 2023. "Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit X Bekasi". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 73–89.  
<https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.463>.
- Harefa, N. B., Zebua, S., dkk. 2022. "ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)". *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>.
- Huseno, Dr. Tun, SE., M. S. 2016. *Pegawai, Kinerja Tinjauan Dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja*.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., dkk. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una". *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433–1441.
- M. Arif Pratama Manurung, Aswaruddin Aswaruddin, dkk. 2024. "PeM. Arif Pratama Manurung, Aswaruddin Aswaruddin, Laudy Livianti, Cendani Alfanizha Hidma, Nur Siti Maysarah, & Indah Wahyuni. (2024). Pentingnya Evaluasi Penilaian Kinerja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), 77–84. <https://doi.org/10.30872/jispendor.v3i1.9717>". *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), 77–84.
- Makaminang, N. E., Ilat, V., dkk. 2022. "Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado". *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 325–334.
- Prof. Dr. Sugiyono 2023. "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif".
- Rahman, D., dan Rahman, K. 2021. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi". *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 39–53.  
[https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).9717](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).9717).
- Rinah, S. A., Suryanti Nengsih, N., dkk. 2024. "Analisis Kinerja Instansi Pemerintahan Di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 60–74. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i1.186>.
- Warman, W., Komariyah, L., dkk. 2023. "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>.
- Yuliati, D. 2025. "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 32–42. diambil dari <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/206>.
-